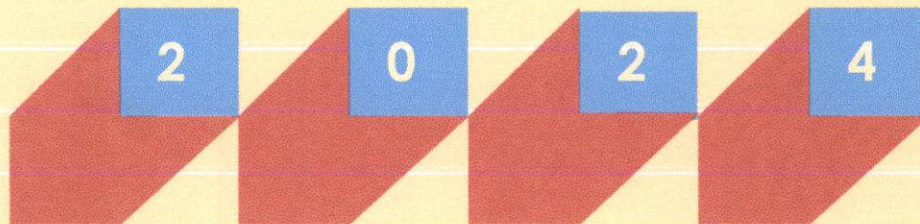




**Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur**

RENCANA KERJA (RENJA)



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Malili, Juni 2023
KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH,

MUHAMMAD SAID, SE,MM

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19790313 200502 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPENDA Tahun Lalu dan Capaian Renstra BAPENDA.	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPENDA.....	
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPENDA	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPENDA.....	
3.3 Program dan Kegiatan BAPENDA.....	
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	
 BAB V PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 secara garis besar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap penetapan renja perangkat daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Luwu Timur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
4. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Permendagri 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif Tahun 2024 yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk :

- a. Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- b. Memasukkan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.
- c. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun sebelumnya.
- d. Mensinergikan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan dokumen RKPD Kabupaten Luwu Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka sistematika penyusunan Renja BAPENDA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BAPENDA, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat uraian tentang gambaran kedudukan BAPENDA, rencana Kerja BAPENDA, keterkaitan antara Renja BAPENDA dengan Dokumen RKPD dan Renstra BAPENDA.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja BAPENDA Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BAPENDA.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja BAPENDA, serta susunan garisbesar isi dokumen setiap BAB beserta Sub BAB sesuai Permendagri 86 Tahun 2017.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENNDAPATAN DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja BAPENDA Tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPENDA Tahun Lalu dan Capaian Renstra BAPENDA.

Memberikan uraian dan penjelasan dari hasil pelaksanaan Renja setiap program kegiatan dan capaian Renstra BAPENDA.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPENDA

Menjelaskan dan menyajikan hasil analisa kinerja pelayanan BAPENDA serta indikator yang mempengaruhi kinerja tersebut.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPENDA

Permasalahan yang dikedepankan untuk ditanggapi yang dianggap penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPENDA.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Menyajikan tabel perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan yang ada.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Menggambarkan dan menguraikan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BAPENDA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menguraikan dan menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BAPENDA.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPENDA

Menguraikan dan menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPENDA.

3.3 Program dan Kegiatan BAPENDA

Menguraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan BAPENDA.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pada bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPENDA Tahun Lalu dan Capaian Renstra BAPENDA

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja Instansi Pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja BAPENDA Kabupaten Luwu Timur.

Secara umum, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah (Renja BAPENDA) dilakukan dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja dan sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja Perangkat Daerah, untuk kemudian dianalisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja sebagai bahan perbaikan dimasa yang akan datang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang ditetapkan.

Terkait dengan hal tersebut diatas Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun berjalan dan perkiraan target tahun 2024.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2024 Pagu sebesar **Rp. 15.641.470.050,-** (*Lima Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah*). Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur**

Badan Pendapatan Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (N-2)			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022	
					Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Tahun 2022 (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)x100%
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	2			KEUANGAN									
5	2	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	95,50%	-	-	-	-	95,00%	95,00%	99,47%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu (%)	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00
5	5	5	2.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	-	-	-	3	3	100
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	1	-	-	-	1	1	100

				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	1	-	-	-	-	1	1	100
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Laporan)	10	-	-	-	-	10	10	100
5	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terselenggara dengan Baik (%)	96,80	-	-	-	-	96,60	96,60	99,79
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang)	31	-	-	-	-	29	29	93,54
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	19	-	-	-	-	19	19	100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan yang laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran (Laporan)	19	-	-	-	-	19	19	100
5	2	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai Standar (%)	98,20	-	-	-	-	98,00	98,00	99,79
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Laporan)	4	-	-	-	-	4	4	100
5	2	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	95,20	-	-	-	-	95,00	95,00	99,78
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (Dokumen)	12	-	-	-	-	12	12	100
				Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (Orang)	450	-	-	-	-	450	450	100

				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	46	-	-	-	-	44	44	95,65
5	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (%)	95,00	-	-	-	-	95,00	95,00	100,00
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)	5	-	-	-	-	5	5	100
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	3	-	-	-	-	3	3	100
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	18	-	-	-	-	18	18	100
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	3	-	-	-	-	3	3	100
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	132	-	-	-	-	132	132	100
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (Laporan)	4	-	-	-	-	4	4	100
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	136	-	-	-	-	125	125	91,91
5	2	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi (%)	97,00	-	-	-	-	97,00	97,00	100,00
				Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (Paket)	4	-	-	-	-	5	5	125
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	10	-	-	-	-	10	10	100
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	1	-	-	-	-	1	1	100
5	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	98,00	-	-	-	-	98,00	98,00	100

				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	12	-	-	-	-	12	12	100
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	12	-	-	-	-	12	12	100
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	12	-	-	-	-	12	12	100
5	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara dengan baik (%)	95,00	-	-	-	-	95,00	95,00	100,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	8	-	-	-	-	8	8	100
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	55	-	-	-	-	50	50	90,90
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	-	-	-	-	1	1	100
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah (%)	91,00	-	-	-	-	90,50	90,50	99,45
5	2	4	2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		97,50	-	-	-	-	97,20	97,20	99,69
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah (Dokumen)	4	-	-	-	-	4	4	100
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah (Dokumen)	6	-	-	-	-	6	6	100

				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah (Laporan)	12	-	-	-	-	12	12	100
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak (Laporan)	12	-	-	-	-	12	12	100
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek pajak yang disesuaikan NJOPnya (Objek Pajak)	114.000	-	-	-	-	114.000	114.000	100
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah (Dokumen)	140	-	-	-	-	130	130	92,86
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah (Layanan)	24	-	-	-	-	24	24	100
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi (Laporan)	12	-	-	-	-	12	12	100
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah (Dokumen)	98	-	-	-	-	97	97	98,98

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dalam mencapai target pendapatan daerah dan melihat potensi PAD yang ada di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 pada Misi 4 yaitu **Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik** dengan tujuan **Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pendanaan Sumber Sumber Belanja Daerah**, maka dalam pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah untuk mendukung misi, tujuan dan sasaran tersebut Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
3. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara Badan Pendapatan Daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan pelayanan dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur didukung oleh ketersediaan sumber daya aparatur sejumlah keseluruhan 24 (dua puluh empat) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 24 (dua Puluh Empat) orang Tenaga Upah Jasa. Selain didukung oleh sumber daya aparatur, dalam pelaksanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah juga didukung oleh adanya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia.

Untuk pengelolaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya melalui penerimaan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur menggunakan program aplikasi SIMPADA (Sistem Informasi Manajemen

Pajak Daerah) yang bertujuan untuk :

1. Aplikasi Simpada ini merupakan sebuah platform sistem yang mempunyai 2 fungsi utama, yakni sebagai pengelola database, dimulai dari pendaftaran, pelaporan, penetapan, pembuatan kode billing sampai dengan penyajian laporan. Simpada juga memiliki fungsi API (Application Processing Interface) yang bisa menghubungkan Simpada dengan sistem lainnya;
2. Sistem pelaporan dan pendaftaran wajib pajak daerah dilakukan secara on line;
3. Meningkatkan pelayanan publik atau masyarakat dalam hal pengadministrasian pajak daerah, mengurangi tingkat penyimpangan dari pihak pengelola pajak daerah karena kontak langsung dengan petugas sangat minim;
4. Memfasilitasi proses transaksi non tunai yang semakin marak digunakan oleh masyarakat agar lebih efisien dan efektif;
5. Menyiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk mampu memanfaatkan alat bantu komputer didalam mengefisiensikan dan mengefektifkan tugas sehari-hari.

Selain Aplikasi yang digunakan, untuk pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah yang salah satunya melalui penerimaan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah Kab.Luwu Timur juga berinovasi melalui :

1. LAKELLING (Layanan Keliling)

Menghadirkan Layanan Pajak Daerah Keliling dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah yang terfokus di pelayanan dan percepatan pembayaran pajak

2. SARTIKA (Satu Qris Satu Unit Kerja)

Dengan tujuan menekan pembayaran tunai ke non tunai, meminimalisir lost penerimaan pendapatan di sektor perangkat daerah/unit kerja dalam pengelolaan pendapatan, mewujudkan Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Luwu Timur khususnya poenggunaan QRIS yang merupakan program nasional

3. SI OCA (Sistem Informasi One Click Away)

Sebagai Reminder/pengingat otomatis terkait pelaporan pajak untuk meningkatkan pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu, memberikan informasi yang berkaitan tentang pajak secara on line dengan sasaran para wajib pajak daerah Kabupaten Luwu Timur

4. SIPAKATAU (Sistem Pajak Daerah Terpadu)

Meningkatkan pelayanan publik atau masyarakat dalam hal pengadministrasian pajak daerah secara on line

5. Pembayaran PBB-P2 Secara E-Commerce

Mengoptimalkan pembayaran PBB-P2 melalui kemudahan pelayanan pembayaran berbasis digital melalui :

- Ovo
- Shopee

Kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat mengharuskan pelayanan publik untuk segera dibenahi menuju pelayanan digital yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

Adapun pokok rencana kerja yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah dengan melibatkan seluruh OPD pengelola pendapatan dan Pembentukan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Luwu Timur
2. Penggalian seluruh potensi pendapatan daerah baik secara intensifikasi dan ekstensifikasi
3. Pemutakhiran data wajib pajak (data lama dan baru)
4. Harmonisasi dan revisi kebijakan
5. Penguatan Pengawasan
6. Pengembangan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7. Evaluasi

Sebelas jenis objek pajak yang difokuskan sebagai penerimaan yang memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah yaitu

- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
- Pajak Restoran
- Pajak Reklame
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pajak Hotel
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
- Pajak Hiburan

- Pajak Air Tanah
- Pajak Parkir
- Pajak Walet

Dengan adanya perkembangan dibidang teknologi informasi, maka diharapkan ketersediaan dan keakuratan data yang dihasilkan atau disajikan dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pendanaan Sumber – Sumber Belanja Daerah	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah)	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah	95,40
2				Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah	26,07

2.2.1 Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Secara garis besar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam tahun-tahun yang lalu mempunyai arah kebijakan yang akan diambil dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi meliputi:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah
2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi Aparatur Bapenda
3. Peningkatan kualitas kinerja Aparatur Bapenda
4. Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja Bapenda

Secara umum program dan kegiatan BAPENDA Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja pada 1 (satu) Tujuan dengan 2 (dua) sasaran yang ditetapkan.

Tabel Indikator Kinerja Tujuan

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tahun Ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka memperkuat pendanaan sumber – sumber belanja daerah	Tingkat Kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibanding pendapatan daerah)	21,32	23,11	23,93	26,07	26,55	27,73

Analisis Kinerja Pelayanan badan yang berpedoman pada Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Indikator Kinerja Sasaran OPD

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah	95,00	95,00	95,20	95,40	95,60	95,80	95,80
2	Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah	21,32	23,11	23,93	26,07	26,55	27,73	27,73

Tabel Realisasi Pendapatan Tahun 2017-2022

TAHUN	REALISASI
2017	Rp.1.365.172.782.139,53
2018	Rp.1.466.152.959.822,66
2019	Rp.1.513.976.802.499,03
2020	Rp1.495.670.435.578,65
2021	Rp1.549.649.873.412,52
2022	Rp. 1.732.654.721.069,29

Sumber Data : Audited BPK RI

Dari tabel di atas dapat dilihat progress realisasi pendapatan untuk enam tahun terakhir dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, terus mengalami peningkatan.

Tabel Persentase Proporsi Realisasi Pendapatan Tahun 2022

1	Pendapatan	%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	19,56
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11,62
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	0,18
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,36
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6,40
1.2	Dana Perimbangan	58,33
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan pajak	0,18
1.2.2	Dana Alokasi Umum	28,72
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	11,84
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	22,10
1.3.1	Pendapatan Hibah	2,43
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	11,86
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	6,96
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,85

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase proporsi tertinggi dalam Realisasi Pendapatan terdapat pada Dana Perimbangan sebesar 58,33 Persen, pada pos Dana Alokasi Umum sebesar 28,72 persen. Sedangkan yang terendah ada pada Pendapatan Asli Daerah prosentasenya sebesar 19,56 Persen sementara Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 22,10%.

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2021 (kondisi awal)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2021 (kondisi awal)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2021 (kondisi awal)	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3) (4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah	95,00	95,00	103,42	107,16	95,00	95,00	
2	Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah	21,32	23,11	19,74	19,69	21,32	23,11	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai koordinator Bidang Pendapatan Daerah, melalui program dan kegiatannya khususnya program kegiatan strategis berupaya dengan maksimal untuk melakukan tupoksinya demi tercapainya sasaran strategis yang telah ditentukan. Badan Pendapatan Daerah tetap melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dan pemerintah provinsi khususnya dibidang peningkatan kualitas pendapatan daerah agar sesuai dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai target pendapatan daerah. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Melakukan koordinasi dalam hal gerakan optimalisasi pendapatan perlu dimaksimalkan baik secara vertikal dan horizontal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
2. Tuntutan pelayanan berbasis digital dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, akurat, dan efisien perlu perbaikan sistem di aplikasi teknologi komunikasi yang dapat memproses dan memberikan pelayanan kepada wajib pajak secara lebih luas di seluruh Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
3. Memperkuat jaringan dan jangkauan operasional Layanan Pajak Daerah Keliling (LAKELING) bagi daerah yang masih kurang dari sisi jaringan komunikasi internet diperkuat dan jemput bola yang dianggap strategis bagi optimalisasi pendapatan;
4. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas sumber daya aparturnya yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan daerah lainnya. Teknologi saat ini telah memudahkan informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh penggunanya. Memudahkan pertukaran informasi melalui dunia maya.

Penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan *clean governance* telah menciptakan perubahan-perubahan penting dalam praktek pemerintahan baik pusat maupun daerah. Perubahan tersebut diantaranya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Maka dari itu, pemerintah daerah dituntut segera menyesuaikan program dan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan di segala bidang. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan pajak belum optimal disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan anggaran operasionalnya.
2. Jumlah personil dan sumber daya aparatur yang belum sebanding dengan beban kerja.
3. Masih terdapat wajib pajak yang belum tertib dilapangan.
4. Kurangnya kesadaran dari aparatur untuk lebih mandiri dalam memahami peraturan-peraturan perundangan dan mengemban tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam optimalisasi PAD.

Dampak dari kendala tersebut dapat menghambat/mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program strategis yang telah tertuang dalam visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain :

- a. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.
- b. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan pendapatan daerah.
- c. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- d. Membuat kebijakan terkait dengan perpajakan maupun penerimaan lainnya serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran membayar pajak.
- e. Mengidentifikasi potensi-potensi penerimaan bagi peningkatan pendapatan daerah.
- f. Peningkatan pelayanan publik dalam pencairan dana sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan masing-masing.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Program dan kegiatan pada rancangan awal RKPD perlu dilakukan review setiap tahun. Adapun gambaran review terhadap rancangan awal Rencana Kerja pada Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Luwu Timur	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	96,00	12,917,344,050	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Luwu Timur	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	96,00	12,917,344,050	
a.	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	77,779,300	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	77,794,600	
1.	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	2	60.642.000	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	2	61.057.000	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	3.002.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	3.002.000	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Lapran hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	3.000.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Lapran hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	3.000.600	
6.	Evaluasi Kinerja	Kab.	Jumlah Laporan	10	11.135.000	Evaluasi Kinerja	Kab. Luwu	Jumlah Laporan	10	10.735.000	

	Perangkat Daerah	Luwu Timur	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			Perangkat Daerah	Timur	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			
b	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ('%)	97	10,388,557,860	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ('%)	97	10,313,482,560	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu Timur	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	29	10,270,846,860	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu Timur	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	29	10,195,771,560	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	12	21.337.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	12	23.982.000	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD (laporan)	19	96.334.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD (laporan)	19	93.729.000	
c	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%)	95,50	13,581,000	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%)	95,50	13,581,000	
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	4	13.581.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)		13,581,000	
e	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ('%)	95	268,601,000	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ('%)	95	263,261,000	

2	Pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (Dokumen)	12	31.306.000	Pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (Dokumen)	12	25,966,000	
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang – undangan (orang)	450	34.465.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang – undangan (orang)	450	34,465,000	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang – undangan (orang)	29	202.830.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	29	202,830,000	
F	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	95	494,090,370	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	95	494,090,370	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu Timur	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	5	5,300,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	5	5.300.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Luwu Timur	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	2	2.182.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	2	2,182,000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu Timur	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	18	6.905.570	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	18	5,130,570	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Luwu Timur	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	3	171.247.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	3	173,022,000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan (dokumen)	36	3.720.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan (dokumen)	36	3,720,000	

	Pajak Daerah		pengembangan pajak daerah (dokumen)			Pajak Daerah		pajak daerah (dokumen)			
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah (laporan)	12	216.510.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah (laporan)	12	216.510.000	
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (laporan)	12	225.039.600	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (laporan)	12	225.039.600	
5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Luwu Timur	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya (Objek Pajak)	114000	1.037.856.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Luwu Timur	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya (Objek Pajak)	114000	1.037.856.000	
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah (dokumen)	145	279.184.400	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah (dokumen)	145	279.184.400	
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah (Layanan)	24	52.119.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah (Layanan)	24	52.119.000	
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi (laporan)	12	183.717.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi (laporan)	12	183.717.000	
9	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Pajak Daerah (dokumen)	98	328.578.000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	98	328.578.000	
	Jumlah				15.641.470.050	Jumlah				15.641.470.050.	

	Kantor	Timur	pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)			Kantor		pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)			
I	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	95	187,930,000	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	95	187,930,000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Luwu Timur	Jumlah kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	8	54.920.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	8	54,920,000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	55	88,010,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	55	88,010,000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	45.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	45.000.000	
C	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah (%)	97,50	2.724.126.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah (%)	97,50	2.724,126,000	
a.	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah (%)	90	2.724.126.000	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah (%)	90	2,724,126.000	
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah (dokumen)	4	156,861,000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah (dokumen)	4	156,861,000	
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta	6	244.261.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan	6	244.261.000	

6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan tamu yang difasilitasi (laporan)	4	11.250.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan tamu yang difasilitasi (laporan)	4	11,250,000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	140	293.485.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	140	293,485,800	
9-	KEGIATAN PENGADAAN BARAN MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%')	97	1.214,850,000	KEGIATAN PENGADAAN BARAN MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%')	97	1.295,250,000	
1	Pengadaan Mebel	Kab. Luwu Timur	Jumlah unit mebel yang disediakan (unit)	30	15.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah unit mebel yang disediakan (unit)	30	15,000,000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	45	443.850.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	45	524,250,000	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	5	756.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	5	756,000,000	
h	KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%')	100	271,954,520	KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%')	100	271,954,520	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	27,154,520	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	27,154,520	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu Timur	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12	204.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12	204,000,000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kab. Luwu	Jumlah laporan penyediaan jasa	12	40.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		Jumlah laporan penyediaan jasa	12	40,800,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tahapan penyusunan RENJA Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Secara umum tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang dan Forum Organisasi Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan Tupoksi Badan Pendapatan Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur ini mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, serta Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah yang harus disinkronisasikan dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut :

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
 - a. Pengendalian Jumlah Penduduk;
 - b. Reformasi Pembangunan Kesehatan:
 - 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (*demand and supply*);
 - 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
 - c. Reformasi Pembangunan Pendidikan;
 - d. Sinergi Percepatan.
2. Bidang Ekonomi
 - a. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas;
 - b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
 - c. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
 - d. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi;
 - e. Reformasi Keuangan Negara.
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - a. Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Bidang Sarana dan Prasarana
 - a. Peningkatan Ketahanan Air;
 - b. Penguatan Konektivitas Nasional:

- 1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah;
- 2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi;
- 3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan.
- c. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar:
 - 1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional;
 - 2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi;
 - 3) Penataan Perumahan/Permukiman.
5. Bidang Politik
 - a. Konsolidasi Demokrasi.
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
 - a. Percepatan Pembangunan MEF dan Alamsus POLRI
 - b. Pemberdayaan Industri Pertahanan;
 - c. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri.
7. Bidang Hukum dan Aparatur
 - a. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik;
 - b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
 - a. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;
 - b. Pengelolaan Risiko Bencana;
 - c. Sinergi Pembangunan Perdesaan.
9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
 - a. Perkuatan Ketahanan Pangan;
 - b. Peningkatan Ketahanan Energi;
 - c. Percepatan Pembangunan Kelautan;
 - d. Peningkatan Perekonomian dan Keanekaragaman Hayati dan Kualitas lingkungan hidup.

Sedangkan untuk RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025, dengan agenda pembangunan nasional sebagai penjabaran operasional yaitu :

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama;
2. Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur;
3. Segala bentuk kendala regulasi disederhanakan, dan dipangkas;
4. Penyederhaan Birokrasi akan terus dilakukan besar-besaran;

5. Transformasi Ekonomi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur harus mendukung tercapainya bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah

Dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, Tujuan dan Sasaran Renja BAPENDA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 mengacu kepada Misi 4 yakni Terciptanya Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik dengan arah kebijakan Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah, Peningkatan kualitas pelayanan administrasi Aparatur Bapenda, Peningkatan kualitas kinerja Aparatur Bapenda, Peningkatan tertib administrasi kinerja Bapenda.

Adapun sasarannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel Meningkatnya Kinerja Pengelolaan
Pendapatan Daerah**

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pendanaan Sumber – Sumber Belanja Daerah	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur merencanakan akan melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dan kegiatan sebanyak 9 (sembilan) yang didukung oleh 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

No	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
1.1	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
4	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
4.1	Pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian
4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5 KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

- 5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 5.6 Fasilitas Kunjungan Tamu
- 5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6 KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

- 7.1 Pengadaan Mebel
- 7.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

- 7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8 KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

No	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
1	KEGIATAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

- 1.1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- 1.2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- 1.3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- 1.4 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- 1.5 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 1.6 Penetapan Wajib Pajak Daerah
- 1.7 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- 1.8 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- 1.9 Penagihan Pajak Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas 2 program, 9 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran 15.641.470.050,- Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

	PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2024 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		12.917.344.050	APBD
1.1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		77.794.600	APBD
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah	2 Dokumen	61.057.000	APBD
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.002.000	APBD
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.000.600	APBD
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10.735.000	APBD
1.2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		10.313.482.560	APBD
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	10.195.771.560	APBD
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	12 Dokumen	23.982.000	APBD

	Kuangan SKPD			
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKP	19 Laporan	93.729.000	APBD
1.3	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		13.581.000	APBD
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	4 Laporan	13.581.000	APBD
1.4	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		263.261.000	APBD
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian	12 Dokumen	25.966.000	APBD
1.4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	450 Orang	34.465.000	APBD
1.4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	29 Orang	202.830.000	APBD
1.5	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		494.090.370	APBD
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	5.300.000	APBD
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	2.182.000	APBD
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18 Paket	5.130.570	APBD
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	173.022.000	APBD
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36 Dokumen	3.720.000	APBD
1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	11.250.000	APBD
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 Laporan	293.485.800	APBD
1.6	KEGIATAN PENGADAAN BARAN MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		1.295.250.000	APBD
1.6.1	Pengadaan Mebel	30 Paket	15.000.000	APBD
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45 Unit	524.250.000	APBD
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana	5 Unit	756.000.000	APBD

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
1.7	KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		271.954.520	APBD
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	27.154.520	APBD
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	204.000.000	APBD
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	40.800.000	APBD
1.8	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		187.930.000	APBD
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	54.920.000	APBD
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70 Unit	88.010.000	APBD
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	45.000.000	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		2.724.126.000	APBD
2.1	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		2.724.126.000	APBD
2.1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	156.861.000	APBD
2.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen	244.261.000	APBD
2.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	216.510.000	APBD
2.1.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12 Laporan	225.039.600	APBD
2.1.5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	114.000 Objek Pajak	1.037.856.000	APBD
2.1.6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	140 Dokumen	279.184.400	APBD

2.1.7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	24 Layanan	52.119.000	APBD
2.1.8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 Laporan	183.717.000	APBD
2.1.9	Penagihan Pajak Daerah	98 Dokumen	328.578.000	APBD
JUMLAH			15.641.470.050	

Program dan Kegiatan tersebut di atas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah, antara lain pada misi ke 4 (empat), yaitu; **Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik** dengan tujuan **Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pendanaan Sumber Sumber Belanja Daerah**

Untuk mewujudkan misi Kepemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan pengelolaan Pendapatan daerah sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk mewujudkan misi Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan kebijakan peningkatan penerimaan daerah (optimalisasi potensi-potensi pendapatan daerah) baik melalui peningkatan pajak daerah maupun retribusi daerah dan royalti baik dari sektor pertambangan pertambangan maupun sektor lain. Hal tersebut juga disertai dengan penyiapan dan perbaikan regulasi yang telah ada ataupun yang akan dikeluarkan/diterbitkan.

Adapun anggaran yang diajukan berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp.15.641.470.050,-** (*Lima Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah*) dengan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 terlampir.

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2024**

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	3.002.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	3.002.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	3.000.300,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	3.000.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan			10 Laporan	11.135.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Laporan	11.135.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan			19 Laporan	96.334.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif	-	19 Laporan	96.334.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	96,60% Persen			96,40 Persen	13.581.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif	-	96,80% Persen	13.581.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			4 Laporan	13.581.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif	-	4 Laporan	13.581.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	132 Dokumen			36 Dokumen	3.720.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	132 Dokumen	3.720.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Temu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Temu	4 Laporan			4 Laporan	11.250.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	11.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan			140 Laporan	293.485.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	150 Laporan	293.485.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit			8 Unit	54.920.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	8 Unit	54.920.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit			55 Unit	88.010.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	55 Unit	88.010.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	45.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Unit	45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah	97,50 Persen			97,50 Persen	2.724.126.000,00						97,50 Persen	2.724.126.000,00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	24 Layanan			24 Layanan	52.119.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang inovatif	-	24 Layanan	52.119.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen			12 Dokumen	183.717.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang inovatif	-	12 Dokumen	183.717.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	99 Dokumen			98 Dokumen	328.578.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang inovatif	-	99 Dokumen	328.578.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		JUMLAH						15.641.470.050,00							15.641.470.050,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 ini merupakan dokumen rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dalam mendukung tercapainya Visi “ **Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya**” dan target pembangunan yang telah dijabarkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah juga merupakan dokumen perencanaan dalam penyusunan rumusan program dan kegiatan tahun 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Selain sebagai dokumen perencanaan, Renja berfungsi pula sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 Lingkup Badan Pendapatan Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan Badan Pendapatan Daerah, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang demi tercapainya visi dan misi serta kebijakan dan prioritas pembangunan.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Malili, Juni 2023

KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH,

MUHAMMAD SAID, SE,MM

Pangkat : Pembina

NIP. 19790313 200502 1 010